

329/HDI/88

LAPORAN PENELITIAN

**RELEVANSI KURIKULUM PROGRAM S.I JURUSAN
PMP/IKN FPIPS IKIP PADANG DENGAN
KURIKULUM SMA TAHUN 1984
BIDANG STUDI PMP**
(studi analisis isi)



PERPUSTAKAAN UPT PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PENELITIAN

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UPT PADANG.

oleh :

Drs. Helmi Hasan

Drs. Syafnil Effendi, SH

UPT

**Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)
P a d a n g**

1986

A B S T R A K

Keberhasilan seorang guru atau lulusan IKIP melaksanakan tugasnya di lapangan (sekolah) sangat ditentukan oleh bekal - yang diterimanya sewaktu dia berada di IKIP. Salah satu aspek yang berkenaan dengan bekal itu adalah relevan tidaknya kurikulum di IKIP dengan kurikulum di sekolah tempat guru itu mengajar. Sehubungan dengan itu penelitian ini berusaha mengungkap apakah kurikulum Program S₁ Jurusan PMP/ IKN FFIPS - IKIP Padang relevan dengan kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi IMP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif. Setelah penganalisaan data dan pembahasan diperoleh hasil sbb :

1. Kurikulum Jurusan PMP/ IKN terutama mata kuliah bidang studi cukup relevan dengan kurikulum SMA tahun 1984 bidang - studi PMP.
2. Terdapat satu pokok bahasan kurikulum SMA tahun 1984 yang tidak relevan dengan materi dalam silabi perkuliahan Jurusan PMP/ IKN yaitu yang berkenaan dengan sila ke-lima Pancasila. Dengan demikian hanya 92,86% yang relevan.
3. Terdapat tumpang tindih pokok bahasan dalam silabi perkuliahan dari mata kuliah bidang studi Jurusan PMP/ IKN untuk beberapa mata kuliah.

Berdasarkan hasil tersebut di atas diharapkan Dosen pembina mata kuliah bidang studi meninjau silabi perkuliahannya masing-masing dan mengadakan pertemuan/diskusi antar dosen ma ta kuliah yang berdekatan. Dengan demikian tumpang tindih sila

bi akan terhindar dan silabi mata kuliah bidang studi Jurusan
an IMP / IKN akan relevan dengan kurikulum SMA tahun 1984.

	UNIVERSITAS IKIP PADANG
TANGGAL	3-11-1987
SUMBER DATA	Gladiak
NO. BUKU	K 1
NO. INVENTARIS	329/202/UR. (2)
KLASIFIKASI	370.114 HAS. (2)

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penelitian yang berjudul "Relevansi Kurikulum Program S₁ Jurusan PMP / IKN FPIPS-IKIP Padang dengan kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi PMP " dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi permasalahan pendidikan yang akhir-akhir ini sangat disorot yaitu rendahnya mutu lulusan IKIP. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah relevan tidaknya kurikulum di IKIP dengan kurikulum SMTA dan SMTP.

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti telah mendapat bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Atas bantuan itu semua diucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya kami berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini akan dapat menjadi masukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama di Perguruan Tinggi.

Padang, November 1986

Peneliti

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

DAFTAR ISI

		Halaman
A B S T R A K		i
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
B A B I	PENDAHULUAN.	1
	A. Latar belakang penelitian	1
	B. Ruang lingkup dan pembahasan	2
	C. Penjelasan istilah	3
	D. Tujuan Penelitian	8
	E. Asumsi	8
	F. Pertanyaan Penelitian	8
	G. Kegunaan hasil Penelitian	9
B A B II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
	A. Tinjauan Kepustakaan	10
	B. Kerangka Konseptual	12
B A B III	METODOLOGI	13
	A. Populasi dan Sampel	13
	B. Jenis dan sumber data	14
	C. Teknik dan alat pengumpul data	15
	D. Teknik analisa data	16
	E. Prosedur penelitian	16
	F. Keterbatasan	17
B A B IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	18
	A. Analisa	18
	B. Pembahasan	41
B A B V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	44
	A. Kesimpulan	44
	B. Rekomendasi	44
KEPUSTAKAAN		45

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1 Relevansi pokok bahasan kurikulum 1984 SMA dengan materi mata kuliah bidang studi Jurusan PMP / IKN Program S ₁ untuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa.	19
2 Relevansi pokok bahasan kurikulum 1984 SMA dengan materi mata kuliah bidang studi Jurusan PMP / IKN untuk sila kedua	21
3 Relevansi pokok bahasan kurikulum 1984 SMA dengan materi mata kuliah bidang studi kurikulum Jurusan PMP / IKN untuk sila ke tiga	26
4 Relevansi pokok bahasan kurikulum 1984 SMA dengan silabi materi mata kuliah bidang studi Jurusan PMP / IKN untuk sila ke empat	29
5. Relevansi pokok bahasan kurikulum tahun 1984 SMA dengan silabi mata kuliah bidang studi Jurusan PMP / IKN untuk sila ke lima	36
6. Perbandingan pokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum 1984 SMA dengan kurikulum Jurusan PMP / IKN dalam mata kuliah bidang studi menurut Sila Pancasila	44

BAB I

P E N D A H U L U A N

A . Latar Belakang Penelitian

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai berbagai lembaga pendidikan. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang disingkat dengan LPTK. IKIP Padang sebagai salah LPTK membuka berbagai Jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diantaranya Jurusan Pendidikan Moral Pancasila/Ilmu Kewargaan Negara (PMP/IKN). Jurusan PMP/IKN FPIPS-IKIP Padang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga pengajar bidang studi PMP baik di tingkat SMTP maupun di tingkat SMTA. Program yang dibuka selama ini adalah Strata Satu (S_1), Diploma tiga (D_3), dan Diploma dua (D_2). Program Strata satu dengan bobot Sks 144 s/d 160 Sks yang secara khusus dipersiapkan untuk tenaga guru SMTA dan tidak tertutup kemungkinan untuk tenaga guru SMTP. Dalam masa minimal 4 tahun mereka memperoleh bahan pengajaran yang terdiri dari: mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar kependidikan, mata kuliah proses belajar mengajar, mata kuliah bidang studi dan mata kuliah minor. Mata kuliah minor diambil dari Jurusan lain. Mata kuliah proses belajar mengajar dan bidang studi memberikan kemampuan yang cukup untuk mengajar bidang studi PMP. Dengan kata lain keberhasilan mengajarkan mata pe-

ajaran PMP sangat ditentukan oleh mata kuliah proses belajar dan mata kuliah bidang studi tersebut.

Akhir-akhir ini banyak sekali sorotan-sorotan tentang mutu lulusan IKIP yang dikatakan sangat rendah dan merosot sekali. Sorotan ini dengan beralih atas rendahnya mutu lulusan SMTA dan SMTP. Walaupun hal ini tidak merupakan hasil penelitian yang baik namun perlu juga kita pertanyakan. Berbicara dengan mutu lulusan SMTA dan SMTP banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, misalnya: kurikulum yang digunakan, fasilitas yang tersedia, faktor lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat), faktor guru (kuantitas dan kualitas) dan sebagainya.

Berbicara mengenai kualitas guru (tamatan IKIP) ditentukan pula oleh relevan tidaknya kurikulum yang digunakan di IKIP dengan kurikulum SMTA /SMTP. Untuk itu yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah kurikulum PMP/IKN FPIPS IKIP Padang relevan dengan kurikulum SMA 1984. bidang studi PMP. ?".

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan

Penelitian ini melihat relevansi tidaknya kurikulum Program S₁ Jurusan PMP/IKN FPIPS-IKIP Padang dengan kurikulum SMA 1984 bidang studi PMP. Berkenaan dengan itu, maka ruang lingkup dan pembatasan masalah tertuju kepada kedua kurikulum tersebut.

Kurikulum SMA 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 sudah dibakukan kedalam garis-garis besar program pengajaran. Untuk bidang studi PMP meliputi bagian yang terdiri dari: (a) tujuan kurikulum, tujuan instruksional umum, pokok bahasan, dan pemberian. (b) Program, bahan pengajaran, pendekatan pengajaran, sumber dan sarana belajar mengajar serta penilaian.

Sesuai dengan kemampuan, tenaga, dan waktu yang tersedia, maka penelitian ini membatasi diri pada kurikulum SMA 1984 bidang studi PMP hanya bahagian a khusus pokok bahasan saja. Sedangkan untuk kurikulum Program S₁ Jurusan PMP/IKN terbatas pada kurikulum 1985/86 yang terdapat dalam buku pedoman IKIP Padang. Bagian yang diperlukan dalam kurikulum program S₁ tersebut adalah silabi dari masing-masing mata kuliah bidang studi dan PBM.

C. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas konsep-konsep dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan pengertian istilah sehingga tidak terjadi penafsiran yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini adalah istilah kurikulum PMP/IKN, kurikulum SMA 1984 bidang studi PMP dan relevansi. Sebab perbedaan pendapat akan lebih banyak bersumber dari pengertian ketiga istilah itu.

Kurikulum PMP/IKN FPIPS-IKIP Padang yang dimaksudkan

di sini adalah sejumlah mata pelajaran dengan pembobotannya yang dicantumkan dalam buku pedoman IKIP Padang 1985/86 yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan PMP/IKN.

Kesemua mata pelajaran tersebut lengkap dengan sinopsis/silabinya. Mata pelajaran yang tercantum dalam buku pedoman IKIP Padang 1985/86 tersebut bersumber dari kurikulum inti yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982. Di sini jelas bahwa penulis tidak mengikuti pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang memberikan batasan sangat luas sekali seperti J. Galen Saylor dan William M. Alexander serta tokoh-tokoh lainnya.

J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam bukunya *Curriculum Planning for Better teaching and Learning* menjelaskan sebagai berikut. Segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak itu belajar, di halaman sekolah atau di luar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi segala pengalaman yang disajikan oleh sekolah agar anak mencapai tujuan yang ditentukan oleh guru. Suatu tujuan tidak tercapai dengan suatu pengalaman tertentu akan tetapi melalui berbagai pengalaman dalam bermacam-macam situasi di dalam maupun di luar sekolah. Pengalaman di sekolah dapat mempengaruhi pengalaman di luar sekolah dan sebaliknya. Yang dianggap kurikulum adalah hasil yang nyata (*actual learning experiences*) pada anak.

Di sini tampak bahwa para pengarang membedakan rencana pelajaran dengan kurikulum. Kurikulum bagi mereka bukanlah semata-mata atas sejumlah mata pelajaran yang sebaiknya disebut " Program of Studies " (program pelajaran). Bagi Saylor dan Alexander, apa yang dianggap sebagai kegiatan " extra curricular" sesungguhnya sebagian dari kurikulum.

Pengertian tentang kurikulum yang penulis maksudkan mungkin lebih dekat dengan pengertian yang dikemukakan oleh Hilda Taba. Hilda Taba memberikan batasan yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, menurut Hilda Taba tiap kurikulum pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak-anak untuk berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakat. Dan tiap kurikulum bagaimanapun polanya, selalu mempunyai komponen-komponen tertentu yakni pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar dan mengajar, dan akhirnya evaluasi hasil belajar. Perbedaan kurikulum terletak pada penekanan pada unsur-unsur tertentu.

Sehubungan dengan penulisan ini akan diambil hanya satu komponen saja yaitu menyangkut dengan organisasi bahan dan isi pelajaran.

Organisasi bahan pada kurikulum jurusan PMP /IKN terdiri dari :

1. Mata kuliah dasar umum 9 mata kuliah dengan 19 Sks termasuk elektif.
2. Mata kuliah Dasar Keguruan 5 mata kuliah dengan 10 Sks.

3. Mata kuliah Belajar-Mengajar 9 mata kuliah dengan 21 Sks.
4. Mata kuliah bidang studi 38 mata kuliah dengan 90 Sks. termasuk pilihan.
5. Mata kuliah minor 12 mata kuliah dengan 27 Sks.

Mata-mata kuliah tersebut di atas terjabar lagi dalam silabi perkuliahan.

Sesuai dengan permasalahan yang diambil maka yang akan dicari relevansinya adalah mata kuliah bidang studi dan sedikit tentang mata kuliah FBM.

Kurikulum SMA 1984 bidang studi PMP adalah merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang lebih menekankan kepada aspek pengetahuan. Dengan tidak mengabaikan ranah pengetahuan dan perbuatan, Kurikulum ini penekanannya sudah lebih diarahkan pada aspek moral (afektif). Perubahan titik berat ini demi untuk menyesuaikan dengan ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978. Penyempurnaan lebih terlihat pada GBPP PMP yang secara umum bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PMP di sekolah dalam rangka membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan dari kepribadian Pancasila. Secara khusus tujuan yang diinginkan dicapai agar nilai-nilai yang terkandung dalam P. 4 UUD 1945 dan GBHN dapat secara tuntas terjabarkan dalam GBPP PMP. Dalam GBPP PMP tersebut yang menjadi tujuan kurikuler adalah kelima sila dari Pancasila sedangkan tujuan instruksional umum adalah tiga puluh enam butir P₄. Berbicara mengenai metoda belajar mengajar dalam kurikulum 1984 disebutkan :

1. Dalam proses belajar mengajar ditetapkan cara belajar siswa aktif (CBSA) yang karakteristiknya keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan dengan memanfaatkan waktu dan sumber belajar secara berdaya guna dan berhasil guna agar terbina kemandirian cara belajar.
2. Dalam mengembangkan cara belajar ini, digunakan berbagai metode belajar mengajar, seperti ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, inquiri, pembinaan nilai (VCT), bermain peran, karyawisata, permainan simulasi, melalui berbagai langkah yang mengarah pada kemampuan yang mengembangkan perolehan peserta didik.
3. Dalam pengembangan hal itu, perlu ditetapkan kriteria untuk menetapkan konsep-konsep utama yang memantulkan nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik.
4. Program belajar mengajar yang dicanangkan dan dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik.

Relevansi: yang dimaksudkan dengan relevansi dalam makalah ini adalah kesesuaian antara silabi (pokok-pokok bahasan) dalam kurikulum FMF Program S₁ (1985/86) dengan kurikulum 1984 bidang studi FMP SMA. Ini berarti bahwa dari materi yang dikembangkan dalam silabi Program S₁ bidang studi mana saja yang telah menunjang atau sesuai dengan pokok bahasan yang tercantum dalam kurikulum 1984.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah kurikulum Jurusan PMP/ IKN program S₁ relevan dengan kurikulum SMA 1984 bidang studi FMP. Selain dari itu ingin juga melihat gambaran kemana saja mata kuliah bidang studi Jurusan FMP/ IKN itu diarahkan.

E. A s u m s i

Penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi sebagai berikut:

1. Kurikulum SMA 1984 bidang studi FMP sudah dianggap merupakan materi yang cukup lengkap dan sesuai dengan isi yg terkandung dalam sila-sila Pancasila.
2. Pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan sinopsis/ silabus perkuliahan yang teruntuk bagi kurikulum 1985/86 (bersumber dari kurikulum inti).

F. Pertanyaan penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kurikulum Jurusan PMP/ IKN FFIPS- IKIP Padang program S₁ relevan dengan kurikulum SMA 1984 bidang studi FMP ?
2. Kepada sila keberapakah pokok bahasan mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum PMP/ IKN lebih banyak terarah ?

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan Jurusan dan para dosen yg. membina mata kuliah bidang studi dan PBM dalam memperbaiki kurikulum dan silabi perkuliahan.
2. Sebagai pedoman bagi para dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar terutama mata kuliah bidang studi dan PBM.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian khusus mengenai relevansi kurikulum Jurusan PMP/IKN dengan kurikulum SMA 1984 bidang studi PMP, setahu penulis belum ada, sebab kurikulum SMA 1984 baru saja diterapkan. Namun demikian penelitian yang mengkaji relevansi mata kuliah bidang studi D2 PMP/IKN FKPS IKIP Padang dengan kurikulum SMP 1975 sudah pernah dilaksanakan oleh Dra. Aina, Dra. Aina dalam penelitiannya tersebut berkesimpulan bahwa silabi mata kuliah bidang studi (delapan bidang studi) program D2 Jurusan PMP/IKN belum relevan dengan kurikulum SMP 1975 untuk bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Penelitian lain yang erat hubungannya dengan kurikulum SMTA dan kurikulum Jurusan di IKIP Padang adalah :

1. Dra. Aizar Mustafa (1982) menyatakan dalam penelitiannya bahwa antara nilai matematika pada STTB yang diperoleh mahasiswa sewaktu di SMTA tidak berkorelasi secara meyakinkan dengan prestasi belajarnya dalam mata kuliah geografi yang diambilnya pada Jurusan Geografi FKPS-IKIP Padang.
2. Drs. Anwar Ibrahim (1982) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan yang berarti antara hasil belajar Bahasa Indonesia pada STTB mahasiswa sewaktu SMTA dengan hasil belajar Bahasa Indonesia mahasiswa di FKIK-IKIP Padang.

IKIP Padang sebagai salah lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan harus mampu menyiapkan anak didiknya seperti yg. dikehendaki oleh pemakai tenaga kerja, seperti yang ditegaskan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dalam buku II PPSPTK yang menyatakan " Keberhasilan Program Pendidikan dalam hal ini kompetensi lulusannya tidak hanya diputuskan oleh pembina program (baca : pengajar) akan tetapi juga oleh pemakai lulusan khalayak pada umumnya.^{1/}

Fokok pikiran di atas diperjelas lagi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa "kalau selama ini acoun tability semata-mata ditetapkan oleh dosen", maka di dalam wawasan yg. baru penetapannya dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga pihak: Lembaga penghasil, termasuk dosen, kelompok profesional serta pemakai lulusan"^{2/}

Sehubungan dengan pemakai lulusan dimana lulusan akan menjadi tenaga kependidikan terutama di SMTA dan SMTP memerlukan adanya kemampuan yang cukup untuk mengajarkan bidang studi yang ditekuninya. Kemampuan ini sangat ditentukan relevan tidaknya kurikulum di IKIP dengan kurikulum di SMTA dan SMTP.

Selama ini penyusunan kurikulum di IKIP khususnya Jurusan FMP lebih banyak mempedomani kurikulum inti yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan inilah penulis ingin melihat silabus masing-masing mata kuliah bidang studi FMP apakah sesuai dengan

1/. Dirjen Pendidikan Tinggi, Pedoman Pelaksanaan Rola Pembaharuan Sistem Pendidikan II, th. 1980, hal.15.

2/. I b i d, hal. 15

tuntutan guru-guru yang akan mengajar di SMA atau tidak khusus dalam bidang studi PMP.

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha memperhatikan gejala-gejala yg. dapat dikatakan stabil, karena variabel yang diamati hanya dua jenis yaitu kurikulum Program S₁ Jurusan PMP/ IKN FFIPS- IKIP Padang dan kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi PMP - yang keadaannya tetap kecuali sengaja diubah. Kurikulum Program S₁ Jurusan PMP/ IKN sebagai independent variabel (variabel bebas) dan kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi PMP sebagai variabel terikat (dependent variabel).

Kurikulum Program S₁ Jurusan PMP ditetapkan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini disebabkan karena dalam penyusunan kurikulum PMP terutama silabinya harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan kurikulum SMA tahun 1984. Dengan kata lain lembaga penghasil harus memperhatikan kebutuhan di lapangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya maka yang menjadi pengamatan dari kurikulum Program S₁ itu adalah silabi dari mata kuliah bidang studinya yang meliputi 195 pokok bahasan. Pokok bahasan kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi PMP meliputi 47 pokok bahasan. -

BAB III

M E T O D O L O G I

A. Populasi dan Sampel

Generalisasi dari penelitian ini adalah setiap mata kuliah bidang studi pada program S₁ Jurusan PMF/IKN FPIPS-IKIP Padang yang terdapat dalam buku Pedoman tahun 1985/86. Jurusan mata kuliah bidang studi dalam buku pedoman tersebut 37 buah. Karena jumlah mata kuliah sebagai anggota populasi terbatas dan tingkat kepercayaan yang diharapkan tinggi maka kesemua anggota populasi langsung menjadi sampel (total sampling).

Mata kuliah bidang studi tersebut adalah :

1. I4 dan Wawasan Nusantara.
2. Kehidupan Keagamaan di Indonesia
3. PIH / PTHI.
4. Sosiologi Indonesia
5. Kebudayaan Nasional
6. Ekonomi dan Koperasi
7. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral
8. i UUD 1945 dan GBHN
9. Hukum Adat
10. Ilmu Negara
11. Hukum Terdata / Dagang
12. Ilmu Politik
13. Sejarah Perjuangan Bangsa
14. Kewargaan Negara.

15. Pendidikan Lingkungan Hidup
16. Hukum Tata Negara
17. Hukum Pajak
18. Pengantar Filsafat
19. Kurikulum dan Buku Teks FMP.
20. Hukum Internasional
21. Pendidikan Kewargaan Negara
22. Lembaga Hubungan Internasional
23. Hukum Pidana / Kriminologi
24. Hukum Islam
25. Hukum Acara Pidana / Perdata
26. Filsafat Pancasila
27. Seminar
28. Aplikasi Bahasa Inggris

Pilihan:

29. Antropologi Budaya
30. Ekonomi Pembangunan
31. Logika
32. Dasar-dasar Psikologi Kepribadian
33. Psikologi Sosial
34. Azas-azas Management
35. Demokrasi Pancasila
36. Study Sosial
37. Hak Azasi Manusia.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

skunder yaitu :

1. Silabi dari masing-masing mata kuliah bidang studi Program S₁ yang bersumber dari kurikulum inti.
2. Kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi PMP.

Dengan mempedomani jenis data maka yang menjadi sumber data adalah silabi dari masing-masing mata kuliah program S₁ Jurusan FMI / IKN dan kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi PMP itu sendiri.

3. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan bentuk dan karakteristiknya maka teknik pengumpul data yang tepat adalah observasi yaitu pengamatan terhadap silabi dari masing-masing mata kuliah bidang studi Program S₁ Jurusan PMP / IKN dan kurikulum SMA tahun 1984 bidang studi PMP.

Alat pengumpul data yang dipergunakan berupa tabel atau format yang dapat menampung data yang diinginkan. Format tersebut berbentuk seperti di bawah ini.

No.	: Pokok bahasan dalam Kurikulum 1984	: Pokok bahasan mata kuliah bidang studi Jurusan PMP / IKN	: Nama mata kuliah
1.
2.
3.

Dalam penelitian ini hanya dibutuhkan lima buah tabel yang tiap-tiapnya berisi pokok bahasan yang sesuai dengan kelima

silu Pancasila. Tabel pertama mengenai pokok bahasan yang berkenaan dengan silu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tabel kedua mengenai pokok bahasan yang berkenaan dengan silu Kemanusiaan yang adil dan beradab, Tabel ketiga mengenai pokok bahasan yang berkenaan dengan silu Persatuan Indonesia dan begitu juga tabel ke empat dan kelima berkenaan dengan pokok bahasan silu keempat dan kelima.

D. Teknik Analisa Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Caranya adalah dengan membandingkan materi pokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum SMA tahun 1984 dengan materi pengembangan pokok bahasan yang terdapat dalam silabi perkuliahan masing-masing mata kuliah bidang studi Jurusan FMF / IKN Program S₁. Yang dijadikan standar pembandingan dalam hal ini adalah materi pokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum SMA tahun 1984. Untuk mencari persentase dicoba membandingkan jumlah butir pokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum SMA tahun 1984 dengan jumlah butir yang terdapat dalam kurikulum Program S₁.

E. Prosedur Penelitian

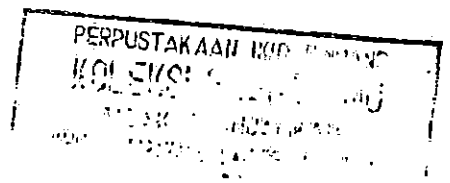
Setelah disadari masalah yang akan diteliti dan untuk terarahnya pelaksanaan penelitian maka disusunlah rancangan penelitian. Berdasarkan desain/rancangan penelitian ini disusunlah format / belanko isian.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan rencana semula. Hasil pengolahan data disusun dalam bentuk draf laporan dan kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan barulah draf laporan penelitian diperbaiki menjadi laporan akhir. Laporan akhir yang diperbanyak disampaikan kepada yang berkepentingan.

F. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan serba keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, tenaga maupun kemampuan. Berdasarkan demikian tentu saja hasil penelitian ini tidak mengandung kebenaran yang mutlak. Selain dari itu dalam penelitian ini seharusnya juga dibandingkan bobot pokok bahasan antara kedua kurikulum yang dibandingkan, baik bobot materi maupun bobot jam yang digunakan. Namun demikian sebagai gambaran umum penelitian ini juga ada manfaatnya.-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG



BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Analisa

Pada bagian ini kita akan mencoba mengadakan analisa tentang relevansi kurikulum jurusan PMP/ IKN Program studi S₁ dengan kurikulum SMA 1984 bidang studi PMP. Cara yang dipakai adalah dengan jalan membandingkan antara materi pokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum SMA 1984 dengan materi pokok bahasan yang ada dalam silabi program S₁ jurusan PMP/ IKN terutama mata kuliah bidang studi. Yang dijadikan pembanding adalah kurikulum SMA 1984.

Untuk kepentingan ini penulis akan membaginya, bahagian ini atas 5 sesuai dengan jumlah sila Pancasila yang merupakan sumber/ isi dari PMP itu sendiri, yaitu relevansi yang mencakup:

1. Materi sila Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Materi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Materi sila Persatuan Indonesia.
4. Materi sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Materi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Relevansi materi sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Materi pembahasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada kurikulum PMP SMA 1984 dan materi silabi perkuliahan program S₁ terlihat pada tabel 1 berikut ini :

TABEL 1

RELEVANSI POKOK BAHASAN KURIKULUM 1984 SMA DENGAN MATERI
MATA KULIAH BIDANG STUDI JURUSAN FMP / IKN PROGRAM S₁
UNTUK SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

No. :	Pokok bahasan dalam Kurikulum 84 SMA :	Pokok Bahasan Mata Kuliah Bidang Studi Jurusan FMP / IKN :	Nama Mata Kuliah :
1 :	2 :	3 :	4 :
1	<p>Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.</p> <p>a. Mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>b. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yg adil dan beradab.</p>	<p>1. Nilai-nilai yang terkandung dalam P4.</p> <p>2. Pola pelaksanaan P4.</p> <p>3. Aliran-aliran Kepercayaan.</p> <p>4. Batang Tubuh UUD 1945.</p> <p>5. Pelaksanaan dan pelestarian UUD 1945.</p>	<p>P4 dan Wawasan Nusantara.</p> <p>sda</p> <p>Kebudayaan Nasional</p> <p>UUD 1945 dan GBHN.</p> <p>sda</p>
2.	<p>Kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda.</p>	<p>6. Pengerian, latar belakang timbulnya dan fungsi P4.</p>	<p>P4 dan Wawasan Nusantara.</p>
3.	<p>Hari-hari besar keagamaan yang resmi diperingati di Indonesia.</p>	<p>7. Kepercayaan pada zaman purba di Indonesia.</p>	<p>Kehidupan keagamaan di Indonesia.</p>
4.	<p>Peringatan hari-hari besar keagamaan dan manifestasinya dalam kehidupan.</p>	<p>8. Perkembangan agama Hindu Dharma di Indonesia.</p> <p>9. Perkembangan agama Budha di Indonesia.</p>	<p>sda</p> <p>sda</p>
5.	<p>Kebebasan beragama dalam negara Pancasila:</p>	<p>10. Perkembangan agama Kristen Katolik di Indonesia.</p>	<p>Kehidupan keagamaan di Indonesia.</p>

1	2	3	4
	a. Negara Indonesia menjamin hak hidup dan berkembangnya setiap agama yang diakui.	11. Perkembangan agama Kristen Protestan di Indonesia	
	b. Mamaksakan sesuatu agama bertentangan dengan Pancasila.	12. Perkembangan agama Islam di Indonesia.	

Pada tabel 1 di atas terlihat empat pokok bahasan FMP Kurikulum 1984 SMA yang isinya berorientasi kepada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat pokok bahasan tersebut ditunjang oleh 12 pokok bahasan dari 4 mata kuliah bidang studi pada Kurikulum Jurusan FMP/IKN. Masing-masing pokok bahasan kurikulum 1984 SMA tidak bisa dinyatakan secara tegas didukung oleh pokok bahasan mana dari mata kuliah bidang studi, sebab 12 pokok bahasan tersebut pada tabel 1 masing-masingnya menyinggung keempat pokok bahasan kurikulum SMA. Walaupun kelihatan ada pokok bahasan yang tidak nyata ditunjang oleh materi silabi perkuliahan namun pokok bahasan mata kuliah Jurusan tersebut memberikan peluang untuk penyesuaian dan pengembangannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa materi perkuliahan pada kurikulum Jurusan FMP relevan dengan Kurikulum 1984 SMA bidang studi FMP.

2. Relevansi materi Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sejauh manakah relevansi pokok bahasan Kurikulum SMA yang mengenai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan materi yang dicantumkan dalam silabi mata kuliah bidang studi Kurikulum Jurusan FMP/IKN dapat kita lihat pada tabel 2 berikut ini.

TABEL 2

RELEVANSI POKOK BAHASAN KURIKULUM 1984 SMA DENGAN MATERI
MATA KULIAH BIDANG STUDI KURIKULUM JURUSAN PMP / IKN
UNTUK SILA KEDUA

No. :	Pokok Bahasan Kuri- kulum 1984 SMA	: Pokok Bahasan M.K.Jurus- : an PMP / IKN.	: Mata Ku- : liah
1	2	3	4
1	<p>Sejarah Hak Azazi Ma- nusia dalam UUD 1945.</p> <p>a. Pengertian Hak Aza- si manusia.</p> <p>b. Perkembangan Hak azazi manusia.</p> <p>c. Hak azazi manusia dalam UUD 1945.</p>	<p>1. Arti dan Pengertian hak manusia.</p> <p>2. Sejarah Hak Azazi ma- nusia secara universal.</p> <p>3. Sejarah hak azazi ma- nusia di Indonesia.</p> <p>4. Hak azazi manusia da- lam UUD 1945.</p> <p>5. Hak azazi dalam kehi- dupan sehari-hari di Indonesia dan masalah aktual dalam bidang hak azazi.</p> <p>6. Hak Azazi Manuasia.</p> <p>7. Hak-hak individu se- bagai subjek hukum.</p> <p>8. Hak dan Kewajiban warga negara dalam proses acara pida- na dan perdata ser- ta jaminan hukum.</p>	<p>Hak Azazi manusia.</p> <p>Hukum Tata Negara.</p> <p>Hukum Perda- ta /Dagang.</p> <p>Hukum Acara Pidana /Per- ta.</p>
2.	<p>Saling mencintai se- sama manusia:</p> <p>a. Cinta pangkal ke- lestarian hidup berkeluarga.</p> <p>b. Yayasan sosial.</p>	<p>9. Etika.</p> <p>10. Wadah dan wujud Pen- didikan Moral Panca- sila.</p> <p>11. Tanggung jawab ke- luarga, sekolah, ma- syarakat dan nega- ra terhadap moral Pancasila.</p> <p>12. Nilai-nilai yang terkandung dalam E.4.</p>	<p>Filsafat Pan- casila. Dasar dan kon- sep Pendidik- an Moral.</p> <p>sda.</p> <p>P4 dan Wawas- an Nusantara.</p>

1	2	3	4
3.	<p>Sikap hormat, menghormati sesama manusia</p> <p>a. Menghormati pendidikan orang lain.</p> <p>b. Hormat-menghormati sebagai landasan kerukunan hidup.</p>	<p>13. Kodrat manusia dalam lingkungan sosio budaya sebagai sumber Pancasila.</p> <p>14. Tujuan dan fungsi Pendidikan Moral.</p> <p>15. Ruang lingkup dan Perkembangan Pendidikan Moral di Indonesia.</p> <p>16. Sumber moral dan isi Pendd. Moral.</p> <p>17. Wadah dan wujud Pendidikan Moral Pancasila.</p> <p>18. Fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai moral Pancasila.</p>	<p>Filsafat Pancasila.</p> <p>Dasar dan konsep Pendidikan Moral.</p>
4.	<p>Azas dan makna keadilan:</p> <p>a. Pengertian keadilan.</p> <p>b. Macam-macam keadilan.</p>	<p>19. Pengertian, tujuan dan fungsi hukum.</p> <p>20. Sumber-sumber hukum.</p> <p>21. Subjek dan objek hukum</p> <p>22. Kesadaran, kepastian dan penafsiran hukum.</p>	<p>PIH / PTHI.</p>
5.	<p>Norma Kemanusiaan menurut ajaran Pancasila.</p> <p>a. Kemanusiaan berdasarkan ajaran Pancasila.</p> <p>b. Macam-macam norma kemanusiaan berdasarkan ajaran Pancasila</p>	<p>23. Pengertian nilai moral, norma dan suara hati.</p> <p>24. Nilai-nilai yang terkandung dalam P4</p> <p>25. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.</p>	<p>Dasar dan konsep Pendidikan Moral.</p> <p>P4 dan Wawasan Nusantara.</p> <p>UUD. 1945 dan GBHN.</p>
6.	<p>Fasal 34 UUD 1945.</p> <p>a. Tatanan asi.</p> <p>b. Panti Asuhan.</p>	<p>26. Batang Tubuh UUD.45</p> <p>27. Pelaksanaan dan Pelestarian UUD 1945.</p>	<p>UUD 1945 dan GBHN.</p>

1	2	3	4
7.	<p>Kebenaran dan Keadilan.</p> <p>a. Kebenaran dan keadilan berlaku di manapun dan bila-mana.</p> <p>b. Peranan Aparat dan alat negara dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.</p>	<p>28. Penegak dan Pelaksana Hukum.</p> <p>29. Bantuan Hukum</p> <p>30. Kedudukan Negara dan Warga Negara dalam Hukum</p>	<p>Hukum Acara / Perdata / Fidana.</p>
8.	<p>Organisasi kerjasama antar bangsa.</p> <p>a. Persekutuan Bangsa-Bangsa.</p> <p>b. Indonesia dalam persekutuan Bangsa-bangsa.</p>	<p>31. Indonesia di tengah Hubungan antar bangsa.</p> <p>32. Peranan Hukum Internasional dalam perhubungan antar bangsa.</p> <p>33. Macam-macam Perhubungan/perjanjian antar bangsa.</p> <p>34. Perwakilan Negara.</p> <p>35. PBB dan Badan-badan khusus PBB.</p> <p>36. Organisasi Internasional / Regional (IGGI, OPEC, ASEAN, dan lain-lain).</p> <p>37. Masalah netralistis yurisdiksi serta imunitas dalam perhubungan internasional.</p> <p>38. Pengertian, sumber dan subjek Hukum Intern.</p> <p>39. Fungsi dan peranan Hukum internasional.</p> <p>40. Masalah pengaturan atas suatu negara.</p> <p>41. Macam-macam perjanjian internasional.</p> <p>42. Masalah netralitas, perang dan damai.</p> <p>43. Masalah yurisdiksi dan teritorial dalam hukum internasional.</p>	<p>Lembaga Hubungan Internasional.</p> <p>Hukum Internasional</p>

Berlainan dengan tabel 1 pada tabel kedua kelihatan tidak adanya keseimbangan antara pokok bahasan kurikulum 1984 - dengan pokok bahasan bidang studi jurusan PMP. Pokok bahasan 1 didukung oleh 8 pokok bahasan mata kuliah bidang studi yaitu dari mata kuliah hak azasi manusia, HTN, Hukum Perdata/Dagang dan hukum acara pidana/perdata. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya tumpang tindih antara pokok bahasan bidang studi PMP seperti antara mata kuliah hak azasi dengan Hukum Tata Negara. Ketimpangan lain adalah mata kuliah hak azasi manusia dalam kurikulum Jurusan PMP/IKN merupakan mata kuliah pilihan. Dalam hal ini tentu ada kemungkinan tidak diambilnya mata kuliah itu oleh mahasiswa.

Pokok Bahasan kedua didukung oleh pokok bahasan 9,10, 11 dan 12. Pokok bahasan ketiga didukung oleh banyak pokok bahasan 9 dan 13 (mata kuliah Filsafat Pancasila) pokok bahasan 10, 14 s/d 18 (mata kuliah dasar dan konsep Pendidikan Moral)serta pokok bahasan 12 (mata kuliah P4 dan Wawasan Nusantara. Pokok Bahasan ke 4 tidak ada pokok bahasan bidang studi PMP yang betul-betul menunjang. Hanya, disinggung oleh pokok bahasan FIH/ FTHI yaitu pokok bahasan 19,20,21 dan 22. Pokok Bahasan kelima didukung oleh pokok bahasan 23,24,25 dari mata kuliah bidang studi PMP/ IKN. Pokok Bahasan penunjang tersebut meliputi mata kuliah Dasar dan konsep pendidikan moral, P4 dan Wawasan Nusantara dan mata kuliah UUD 1945 dan GBHN. Pokok Bahasan 23,24,25 tersebut di atas bisa saja tidak menunjang pokok bahasan kelima dan kurikulum 1984 jika dalam mata kuliah

ketiga bidang studi Jurusan FMP tidak mengetahui materi kelima dimaksud.

Pokok bahasan ke 6 didukung oleh materi mata kuliah jurusan FMP/ IKN melalui pokok bahasan Batang Tubuh UUD 1945 " dan " Pelaksanaan dan Pelestarian UUD 1945 (pokok bahasan 26 dan 27). Pokok Bahasan ke 7 didukung oleh materi mata kuliah Hukum Acara Perdata/ Pidana melalui pokok bahasan Penegak dan Pelaksanaan Hukum, bantuan hukum dan kedudukan negara dan warganegara dalam hukum. Sama halnya dengan pokok bahasan kelima pokok bahasan ke 7 ini juga bisa tidak didukung oleh pokok bahasan 28,29 dan 30 bidang studi Jurusan FMP/ IKN bila dosen Hukum Acara Perdata/ Pidana tidak mengetahui pokok bahasan ke 7 tersebut.

Pokok bahasan ke 8 didukung oleh 13 pokok bahasan bidang studi pada Lembaga Hubungan Internasional dan Hukum Internasional yaitu pokok bahasan 31 s.d. 43. Bila kita nilai secara keseluruhan maka berarti pokok bahasan kurikulum 1984 FMP SMA relevan dengan mata kuliah bidang studi Jurusan FMP/ IKN.

3. Relevansi materi Sila Persatuan Indonesia

Bagaimana pula keadaan relevansi antara kurikulum 1984 bidang studi FMP SMA dengan kurikulum jurusan FMP/ IKN 1985-1986 bidang studi yang berkenaan dengan sila ketiga dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

TABEL 3

RELEVANSI POKOK BAHASAN KURIKULUM 1984 SMA LENGAN MA-
TERI MATA KULIAH BIDANG STUDI KURIKULUM JURUSAN
PME / IKN UNTUK SILA PERSATUAN INDONESIA.

No.	: Pokok Bahasan Kurikulum : 1984 SMA IMP. :	: Pokok Bahasan Mata Kuli- : ah Bidang Studi Jurusan : IMP / IKN :	: Mata : Kuliah :
1	2	3	4
1.	<p>Perjuangan menegakkan merdekaan.</p> <p>a. Perlawanan terhadap Imperialisme</p> <p>b. Pergerakan Nasional.</p>	<p>1. Kerajaan-kerajaan Nusan- tara.</p> <p>2. Perang menentang kolo- nialisme abad 16-19)</p> <p>3. Perkembangan dan peran- an organisasi sosial politik menuju persat- tuan.</p> <p>4. Dari Sumpah Pemuda sam- pai Proklamasi.</p> <p>5. Tantangan dari luar dan dari dalam terha- dap negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Orde Baru dan Pembah- ngunan.</p>	<p>Sejarah perjuangan Bangsa In- donesia.</p>
2.	<p>Nasionalisme Indonesia.</p> <p>a. Pengertian Nasional- isme.</p> <p>b. Konsep dan ciri-ciri nasionalisme Ind.</p>	<p>8. Nasionalisme dan In- ternasionalisme.</p> <p>9. Strategi Politik dan Hankamnas.</p> <p>10. Peranan Warga Negara dalam Ketahanan Nasio- nal.</p>	<p>Ilmu Po- litik.</p> <p>Kewargaan Negara.</p>
3.	<p>Perjuangan mempertahankan kemerdekaan.</p> <p>a. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa.</p> <p>b. Membela, mempertahankan dan mengisi ke- merdekaan.</p> <p>c. Menghayati jiwa Prok- lamasi.</p>	<p>11. Peranan Warga Negara dalam Wawasan Nusan- tara.</p> <p>12. Kepentingan pribadi dan kepentingan umum.</p> <p>13. Pengertian warga nega- ra, orang asing, pendu- duk, rakyat dan bangsa</p> <p>14. Syarat-syarat Kewarga- an Negara.</p>	

1 :	2 :	3 :	4 :
4.	<p>d. Orde baru dan kesaktian Pancasila.</p> <p>Meningkatkan ketahanan bangsa dan Negara.</p> <p>a. Hansip, Kamra.</p> <p>b. Wajib bela umum</p>	<p>15. Peranan Warga Negara dalam kehidupan politik, pertahanan serta peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik dan militer.</p> <p>16. Dasar penelitian wawasan Nusantara.</p>	
5.	<p>Sumpah Pemuda 20-10-1928.</p> <p>a. Kongres Pemuda II.</p> <p>b. Arti Sumpah Pemuda bagi persatuan bangsa.</p>	<p>17. Unsur dasar Nusantara</p> <p>18. Wawasan Nusantara dan Hubungan dengan ketahanan nasional.</p> <p>19. Pengertian kebudayaan dan kebudayaan Nas.</p>	<p>I4 dan Wawasan Nusantara.</p> <p>Kebudayaan Nasional.</p>
6.	<p>Wawasan Nusantara.</p> <p>a. Pengertian wawasan Nusantara.</p> <p>b. Wawasan Nusantara dalam GBHN.</p> <p>c. Konversi Hukum Laut.</p>	<p>20. Kebudayaan Nasional dalam Kesatuan dan Kebinekaan.</p> <p>21. Bertumbuhan dan perkembangan kebudayaan serta pembinaannya.</p> <p>22. Gotong royong dan sifat bangsa Indonesia.</p>	
7.	<p>Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.</p> <p>a. Filsafat hidup bangsa Indonesia, sesuai dengan hati nurani manusia.</p> <p>b. Indonesia dalam forum internasional.</p>	<p>23. Fungsi dan peranan bangsa Indonesia dalam Persatuan bangsa.</p> <p>24. Masyarakat.</p> <p>-definisi masyarakat dalam antropologi budaya.</p> <p>-kehidupan kolektif manusia.</p> <p>-unsur-unsur masyarakat.</p>	<p>Antropologi.</p>
8.	<p>Menghayati rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasarat ketahanan nasional.</p> <p>a. Persatuan dan kesatuan untuk ketahanan nasional.</p> <p>b. Ketahanan nasional untuk kelestarian bangsa Indonesia.</p>	<p>25. Kebudayaan.</p> <p>-Definisi kebudayaan dalam antropologi budaya.</p> <p>-Unsur-unsur kebudayaan.</p> <p>26. Arti, fungsi serta tujuan memahami masyarakat.</p> <p>27. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk.</p>	<p>Sosiologi Indonesia</p>

1 :	2	3	
9	<p>Membina Persahabatan antara bangsa.</p> <p>a. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.</p> <p>b. Ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p>	<p>28. Masyarakat Kota dan Desa.</p> <p>29. Perubahan dan pergeseran nilai.</p> <p>30. Masyarakat dan kebudayaan di Indonesia serta masalah nasional.</p> <p>31. Hukum Adat dalam tata kehidupan bangsa Indonesia.</p> <p>32. Lingkungan Hukum Adat</p> <p>33. Kehidupan sosial budaya dalam berbagai lingkungan Hukum Adat. (Sistem perkerabatan, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan.)</p>	Hukum Adat.

Jumlah pokok bahasan kurikulum 1984 pada bidang studi FMP yang berkenaan dengan sila ketiga Pancasila ada 9 buah. Pokok Bahasan 1 s.d. 5 ditunjang oleh 15 pokok bahasan (1 s.d. 15) mata kuliah bidang studi jurusan FMP yaitu yang meliputi mata kuliah (1) Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia; (2) Ilmu Politik dan (3) Kewargan Negara. Pokok Bahasan ke enam yaitu Wawasan Nusantara didukung oleh pokok-bahasan bidang studi, dalam mata kuliah P4 dan Wawasan Nusantara (pokok bahasan 16,17,18). Khusus mengenai Konvensi Hukum Laut ditunjang oleh mata kuliah Hukum Internasional.

Pokok bahasan ke 7 dan ke 8 ditunjang pokok bahasan 19 s.d. 33 yang meliputi mata kuliah (1) Kebudayaan Nasional, (2) Antropologi,

(5) Hukum Adat. Sub pokok bahasan 6 dan pokok bahasan ke 7 yaitu Indonesia dalam forum Internasional dan pokok bahasan ke 9 lebih banyak didukung oleh pokok bahasan 31 s.d. 37 pada tabel 2 dalam mata kuliah Lembaga Hubungan Internasional dan pokok bahasan 2,3,4 pada tabel 4 dalam mata kuliah UUD 1945 dan GBHN. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pokok bahasan dalam kurikulum 1984 SMA bidang studi FMP yang berkenaan dengan sila 3 sangat relevan dengan kurikulum Jurusan IHI / IKH (bidang studi).

4. Relevansi Materi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Untuk melihat bagaimana relevansi antara pokok bahasan kurikulum SMA yang mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan materi yang dicantumkan dalam silabi mata kuliah bidang studi kurikulum Jurusan FMP/ IKH dapat kita lihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4

RELEVANSI POKOK BAHASAN KURIKULUM FMP/ SMA 1984
DENGAN SILABI MATA KULIAH BIDANG STUDI JURU-
SAN FMP/IKH 1985/86 UNTUK SILA KEEMPAT

No. : Pokok Bahasan Dalam Kurikulum SMA 1984.	Materi Dalam Bidang Studi	Mata Kuliah
1 :	2	4
1. Proklamasi kemerdekaan 17-8-1945.	1. Arti, kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam tata hukum R.I.	UUD 1945 dan GBHN

1	2	3	4
	a. Makna Proklamasi bagi bangsa Indonesia b. Hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945.	2. Pembukaan UUD 1945. 3. Batang Tubuh UUD 1945 4. Pelaksanaan dan Pelestarian UUD.45.	
2.	Demokrasi Pancasila. a. Pengertian dan asas-asas Demokrasi. b. Demokrasi Pancasila dalam UUD 1945.	5. Sejarah perkembangan Demokrasi, pengertian, ciri dan macam-macam demokrasi. 6. Demokrasi Pancasila (sejarahnya, pengertian dan ciri-cirinya) 7. Mekanisme Demokrasi Pancasila. 8. Kesadaran Politik dan Partisipasi dalam bidang politik dalam Negara Pancasila 9. Pendidikan Demokrasi untuk membentuk sikap dan jiwa demokrasi. 10. Lembaga-lembaga Demokratis. 11. Demokrasi Pancasila. 12. Fungsi alat-alat kekuasaan Negara dalam proses pemerintahan. 13. Bentuk Negara dan pemerintahan. 14. Hal Demokrasi. 15. Demokrasi Pancasila.	Demokrasi Pancasila
3.	Pancasila Dasar Negara RI. a. Pancasila sumber dari segala sumber hukum. b. Pancasila sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia.	16. Pancasila sebagai Filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. 17. Nilai objek, dan nilai subjektif dari Pancasila. 18. Pengertian umum universal dan umum kolektif Pancasila.	Filsafat Pancasila.
4.	Sistim Pemerintahan RI.	19. Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.	

1	2	3	4
	<p>a. Tujuh kunci sistim pemerintahan Demokrasi Pancasila.</p> <p>b. Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>c. Ajaran Dwipraja, tri-praja, catur praja dan Pancapraja.</p>	<p>20. Perbandingan filsafat Pancasila dengan filsafat materialistis.</p>	
5.	<p>Lembaga-lembaga Tinggi Negara.</p> <p>a. Kedudukan Presiden, DPR, DPA, BIK dan MA dalam Negara R.I</p> <p>b. Hubungan dan tata kerja antara sesama lembaga Tinggi Negara.</p>	<p>21. Lembaga-lembaga Politik.</p> <p>22. Aturan permainan dalam politik.</p> <p>23. Pengertian latar belakang dan asas-asas HTN.</p> <p>24. Bentuk Negara dan bentuk pemerintahan.</p> <p>25. Pembagian kekuasaan.</p> <p>26. Hubungan antara lembaga-lembaga Negara.</p> <p>27. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>I. Politik</p> <p>HTN</p>
6.	<p>Pengalaman Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> <p>a. Pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat dalam keluarga.</p> <p>b. Penyusunan program kegiatan siswa disekolah melalui musyawarah untuk mufakat.</p> <p>c. Penerapan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>	<p>28. Legitimasi Negara ditinjau dari segi filsafat.</p> <p>29. Beberapa hal pokok tentang kehidupan pemerintah dan warganegara dalam hubungannya dengan pelaksanaan UUD Konstitusi UUD 1945.</p> <p>30. Warga negara dalam hubungan dengan aspek kehidupan ideologi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>Filsafat Pancasila.</p> <p>Pendid. Kewarga negaraan</p>
7.	<p>Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yg berbentuk Republik.</p>	<p>31. Pengertian, konsep dan pendekatan Il. politik.</p>	<p>Ilmu Politik.</p>

1	2	3	4
	a. Arti negara kesatuan, negara serikat dan negara	32. Negara kekuasaan dan Ideologi.	
	b. Perbedaan bentuk Republik dengan bentuk monarki.	33. Kedaubatan Negara teori dan Implikasinya.	
8	Badan Peradilan. a. UU no. 14 /1970. b. KUHAP.	34. Perwakilan dan pengambilan keputusan	
9	Pemahaman asas musyawarah untuk mufakat.	35. Hak asasi, demokrasi serta pelaksanaannya.	H. Acara Perdata / Dagang.
	a. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada pihak lain.	36. Badan, fungsi susunan dan kekuasaan peradilan.	
	b. Mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi dan golongan.	37. Asas Legalitas dan oportunitas.	
	c. Prosedur pengambilan putusan dalam musyawarah untuk mufakat.	38. Penegak dan pelaksana Hukum. 39. Bantuan Hukum.	
10	Hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.	40. Kedudukan Negara dan warga negara dalam Hukum.	
	a. Menerima dan melaksanakan setiap putusan.	41. Aturan permainan dalam proses acara pidana dan perdata.	
	b. Melaksanakan putusan dengan ikhlas dan berlandaskan iktikad baik.		Asas-asas Management
11	Musyawarah demi Keadilan dan kebenaran.	45. Proses pengambilan keputusan.	
	a. Pengertian keadilan dan kebenaran.	46. Kepemimpinan Indonesia.	
	b. Setiap peserta musyawarah bebas mengemukakan pendapat dan melakukan kritik yang bersifat membangun.		
12	Negara Indonesia adalah negara Hukum.	47. Tata Urutan perundang-undangan di Indonesia.	PIH / PTIH.

1 :	2	3	4
	<p>a. Pengertian Negara Hukum</p> <p>b. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.</p>	<p>46. Unifikasi dan koordinasi hukum</p> <p>49. Lapangan-lapangan hukum (perdata, pidana, dagang, agraris, acara adat, pajak, dll).</p> <p>50. Politik Hukum Nasional</p> <p>51. Pengertian dan sejarah perkembangan Ilmu Negara. Tempat I, Negara diantara I. Sosial lainnya.</p> <p>52. Sifat hakekat Negara</p> <p>53. Dasar pembenaran hukum daripada Negara.</p> <p>54. Fertumbuhan Negara.</p> <p>55. Tujuan dan fungsi Negara Negara Hukum ke daulatan.</p> <p>56. Istilah, Fungsi dan tujuan Hukum Pidana.</p> <p>57. Arti, Fungsi dan tujuan Hukum Pidana.</p> <p>58. Norma, asas dan sanksi dalam H. Pidana.</p> <p>59. Perumusan, subjek, jenis, tempat dan waktu tindak pidana.</p> <p>60. Ajaran sebab akibat, kesalahan dan percobaan.</p> <p>61. Delik-delik khusus.</p> <p>62. Jenis-jenis Hukuman.</p> <p>63. Lembaga pemasyarakatan.</p> <p>64. Grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.</p>	<p>I. Negara</p> <p>H. Pidana / Kriminologi.</p>

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
KIP PADANG

Tabel 4 memperlihatkan gambaran yang tidak jauh berbeda dengan tabel 3 terdahulu, dimana keduabelas pokok bahasan dalam kurikulum 1984 SMA bidang studi PMP yang berkenaan dengan sila ke 4 Pancasila ditunjang oleh lebih dari 50 pokok bahasan yang meliputi mata kuliah: (1) UUD 1945 dan GBHN, (2) Demokrasi Pancasila, (4) Ilmu Politik, (5) Hukum Tata Negara (6) Pendidikan Kewarganegaraan, (7) Hukum Acara Perdata/Fidana, (8) Azas-azas management, (9) PIH/LTHI, (10) Ilmu Negara.

Bila diteliti lagi tabel 4 tersebut kelihatan ada pokok bahasan kurikulum 1984 SMA itu yang hanya didukung oleh beberapa pokok bahasan saja dari mata kuliah bidang studi Jurusan PMP / IKN IKIP Padang, sementara ada pula pokok bahasan - kurikulum 1984 itu yang didukung oleh sejumlah besar pokok bahasan bidang studi. Hal ini hendaklah menjadi perhatian dari Jurusan PMP / IKN dalam merevisi kurikulum.

Bila kita lihat masing-masing pokok bahasan kurikulum - 1984 SMA terlihatlah sebagai berikut :

1. Pokok bahasan pertama didukung oleh 4 pokok bahasan dari materi dalam silabi bidang studi Jurusan PMP / IKN yaitu pokok bahasan 1 s.d. 4 (mata kuliah UUD 1945 dan GBHN).
2. Pokok bahasan kedua, didukung oleh materi dalam silabi bidang studi Jurusan melalui pokok bahasan 5 s.d 15 dari mata kuliah Demokrasi Pancasila, Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara. Yang perlu mendapat perhatian adalah mata kuliah Demokrasi Pancasila dalam kurikulum Jurusan PMP / IKN sta-

tusnya pilihan, jadi ada kemungkinan tidak dipilih oleh mahasiswa. Di samping itu terdapatnya tumpang tindih materi perkuliahan dari mata kuliah-matakuliah tersebut. Dengan demikian akan terdapat pemborosan waktu. Untuk sebaiknya perlu ada revisi silabi perkuliahan dari masing-masing Dosen pembina matakuliah.

3. Pokok bahasan ketiga, ditunjang oleh pokok bahasan mata kuliah bidang studi yaitu pokok bahasan 16 s.d. 20 dari matakuliah Filsafat Pancasila.
4. Pokok bahasan keempat didukung oleh materi silabi perkuliahan melalui pokok bahasan 2,3,4 dari matakuliah UUD 45 dan GBHN dan pokok bahasan 24,25 dan matakuliah Hukum Tata Negara serta pokok bahasan 13 dari matakuliah Ilmu Negara.
5. Pokok bahasan kelima didukung oleh pokok bahasan 21 s.d. 27 dari matakuliah Ilmu Politik dan HTN.
6. Pokok bahasan keenam didukung oleh materi perkuliahan melalui pokok bahasan 9,34 dan 35.
7. Pokok bahasan ke tujuh melalui pokok bahasan 24 dan 28 dari matakuliah bidang studi.
8. Pokok bahasan kedelapan materi silabi 36,37,38 dan 41,dan 56 s.d. 64 dari matakuliah Hukum Acara Perdata /Pidana dan matakuliah Hukum Pidana / Kriminologi.
9. Pokok bahasan kesembilan, sepuluh dan sebelas didukung oleh mata kuliah Demokrasi Pancasila melalui pokok bahasan 8 dan 9, matakuliah Ilmu Negara dengan pokok bahasan 15,

matakuliah Ilmu Politik pokok bahasan 34, Azas-azas Management pokok bahasan 45, matakuliah I4 dan Wawasan Nusantara (pokok bahasan tentang nilai nilai yang terkandung - dalam P4),

12. Pokok bahasan duabelas ditunjang oleh materi perkuliahan Hukum Tata Negara, UUD 1945 dan GBHN dan PTHI hampir pada setiap pokok bahasan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum Jurusan FME/ IKN sangat relevan dengan kurikulum 1984 SMA bidang studi PMP.

5. Relevansi Materi Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk melihat relevansi materi sila kelima Pancasila pada kurikulum 1984 SMA bidang studi PMP dengan materi perkuliahan, kurikulum Jurusan FME/ IKN dapat dilihat melalui tabel 5 berikut ini.

Tabel 5

RELEVANSI POKOK BAHASAN KURIKULUM FME-SMA 1984 DENGAN
SILABI MATA KULIAH BIDANG STUDI JURUSAN FME/ IKN
1985-1986 UNTUK SILA KELIMA

No. : Pokok Bahasan dalam Kurikulum SMA 1984.	: Materi dalam Bidang Studi	: Mata Kuliah
1. Pasal 33 UUD 1945. a. Makna Pasal 33 UUD 1945 bagi bangsa Indonesia	1. Masalah dan prinsip ekonomi. 2. Faktor-faktor produksi	Ekonomi / Koperasi

1	2	3	4
2	<p>b. Peranan swasta dalam perekonomian di Indonesia.</p> <p>Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi.</p> <p>a. Pengertian demokrasi ekonomi.</p> <p>b. Kegiatan ekonomi ditujukan bagi kemakmuran rakyat.</p>	<p>3. Sistem ekonomi terutama ekonomi Pancasila.</p> <p>4. Masalah aktual bidang ekonomi.</p> <p>5. Pengertian Koperasi ideologi koperasi dgn. ps. 33 UUD 1945.</p> <p>6. Sejarah perkembangan koperasi, dan peranannya dalam perekonomian di Indonesia.</p> <p>7. Organisasi dan teknik koperasi.</p> <p>8. Jenis-jenis koperasi.</p> <p>9. Sikap dan bantuan pemerintah terhadap koperasi.</p>	Sosiologi Ind.
4	<p>Meningkatkan usaha dan tanggung jawab.</p> <p>a. Partisipasi warganegara dalam pembangunan.</p> <p>b. Kreativitas dan aktifitas warganegara dalam pembangunan.</p> <p>Kesadaran menghormati hak orang lain.</p> <p>a. Pengertian dikuasai oleh negara.</p> <p>b. Sikap menghormati hak orang lain.</p>	<p>10. Arti dan peranan sosial pembangunan.</p> <p>11. Peranan dan sikap mental dalam pembangunan masyarakat Ind.</p> <p>12. Transmigrasi dan KB.</p> <p>13. Hukum waris menurut Islam.</p>	Hak waris.
5	<p>Sikap suka bekerjasama dan tolong menolong.</p> <p>a. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.</p> <p>b. Tidak ada bangsa yang dapat hidup dan berkembang tanpa bantuan dan kerjasama dengan bangsa lain.</p>	<p>14. Zakat fitrah sedekah, infak, wakaf, hibah.</p> <p>15. Fungsi dan peranan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia.</p> <p>16. UU no. 1 1974 tentang perkawinan.</p>	UUD 45 GBHN.
6	<p>Potensi ekonomi bangsa.</p> <p>a. Modal dasar dan faktor dominan pembangunan ekonomi Indonesia.</p> <p>b. Rencana pembangunan lima tahun.</p>	<p>17. Landasan dan tujuan pembangunan.</p> <p>18. Pola dasar dan pembangunan nasional</p> <p>19. Pola dasar pembangunan nasional.</p>	

1 :	2	3	4
7	Industri rumah tangga. a. Wiraswasta dan wira usaha. b. Industri rumah tangga sebagai citra bangsa yang sedang membangun	20. Pola dasar pembangunan jangka panjang. 21. Pola dasar Pelita. 22. Pembangunan dalam bidang I-OLEKSOSBUD agama dan HANKAM.	
8	Sikap hidup sederhana. a. Arti hidup sederhana. b. Sederhana dalam sikap dan perbuatan. c. Kerjasama dalam sikap dengan lingkungan sekitar.	23. Hak dan kewajiban anak isteri dan suami. 24. Penyalahgunaan hak 25. Pewarisan harta benda.	Hk. Perdata. Dagang.
9	Lingkungan hidup dan sumber alam. a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber alam secara berencana.	26. Sumber daya alam yg terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. 27. Ledakan penduduk sebagai salah satu masalah lingkungan hidup.	Pemd. Ling. Hidup.
10	Disiplin Nasional. a. Tata Krama nasional b. Disiplin dalam kelas, sekolah dan masyarakat.	28. Masalah dan usaha mengatasi pencemaran lingkungan hidup 29. Sikap yang diperlukan dalam usaha melestarikan lingkungan hidup.	
11	Wira Usaha dan wira usaha. a. Berpandangan jauh dan luas dalam kehidupan. b. Wirausaha dan swasta merupakan partisipasi dalam pembangunan.	30. Warga negara dalam pembangunan suatu bangsa. 31. Indonesia sebagai kesatuan ekonomi (keuangan, perpajakan, perdagangan)	KWN. Eko. Pemb. Ind.
12	Koperasi sebagai landasan ekonomi masyarakat Indonesia.	32. Arti jenis dan peranan pajak sebagai alat pemerataan pembangunan.	

1 :	2	3	4
13	<p>Teknologi dan Pembangunan.</p> <p>a. Pembangunan bangsa Indonesia.</p> <p>b. Teknologi tepatguna.</p> <p>c. Pembangunan ekonomi</p> <p>d. Kesempatan kerja.</p> <p>e. Kelestarian hidup bangsa Indonesia.</p>	<p>33. Peranan pajak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara.</p> <p>34. Peranan tenaga kerja dalam pembangunan.</p> <p>35. Peranan modal dalam pembangunan.</p> <p>36. Kerjasama ekonomi dalam pembangunan.</p> <p>37. Sumber-sumber penghasilan negara.</p> <p>38. Arti, tujuan, jenis pajak.</p> <p>39. Dasar Hukum mengutamakan pajak.</p> <p>40. Asas-asas pemungutan pajak.</p> <p>41. Jenis pajak</p> <p>42. Peranan pajak dalam pembangunan</p> <p>43. Perlawanan, penyelesaian peradilan dan sanksi pajak.</p>	Hk. Pajak.
14	<p>Fungsi Pajak.</p> <p>a. Peranan pajak dalam pemerataan pendapatan hasil pembangunan.</p> <p>b. Fungsi pajak dalam pemerataan pendapatan masyarakat.</p>		

Pada tabel 5 terlihat 14 pokok bahasan kurikulum 1984 yang berkenaan dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat belas pokok bahasan tersebut secara umum didukung oleh pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam

silabi perkuliahan mata kuliah bidang studi Jurusan IMI / IKN.

Pokok bahasan kurikulum 1984 yang kurang ditunjang oleh materi dalam silabi perkuliahan Jurusan PMP / IKN adalah pokok bahasan 13 yaitu Teknologi dan Pembangunan, yang terdiri dari 5 sub pokok bahasan. Untuk itu perlu penyesuaian/perbaikan silabi mata kuliah Jurusan PMP / IKN.

Suatu hal yang agak berlebihan adalah terhadap pokok bahasan Fungsi Pajak (No.14) dimana pokok bahasan tersebut ditunjang oleh 1- pokok bahasan mata kuliah bidang studi. Kesepuluh pokok bahasan tersebut adalah : Indonesia sebagai kesatuan ekonomi (keuangan, perpajakan, perdagangan). Arti, jenis dan peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan rakyat dan negara; sumber-sumber penghasilan negara; Arti, tujuan, jenis pajak; Peranan pajak dalam pembangunan negara. Semua pokok bahasan tersebut di atas terhimpun dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan Indonesia dan Hukum Pajak. Hal ini jelas menggembirakan. Tetapi di samping itu perlu juga perbaikan silabi perkuliahan karena terdapatnya tumpang tindih. Secara keseluruhan materi sila ke lima hanya 92,86% yang relevan dengan kurikulum Jurusan PMP / IKN.

B. Pembahasan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Sebagaimana disebut pada bahagian pendahuluan mata kuliah IMI juga perlu sedikit ditinjau. Hal ini mengingat terlalu banyak keluhan mengenai jumlah SKS mata kuliah PBM tersebut. Sehubungan dengan ini bila kita kaitkan dengan Kebijakan

sanaan Pokok Pendidikan Moral Pancasila yang dicantumkan dalam GBPP FMP Kurikulum 1984 tentang Metoda Belajar Mengajar yang disebut pada bahagian terdahulu, maka materi mata kuliah PBM itu mutlak perlu. Bahkan dengan adanya mata kuliah IBM tersebut baru relevannya kurikulum Jurusan FMP/ IKN dengan Kurikulum 1984.

Dari kelima aspek relevansi yang telah dikemukakan terdahulu dapat dipahami bahwa secara umum terdapat relevansi yang memadai antara Kurikulum SMA 1984 dengan materi dalam silabi Perkuliahan Jurusan FMP/ IKN. Bila kita bertolak dari kelima aspek yang masing-masingnya merupakan pencerminan dari setiap sila Pancasila, maka hanya ada satu pokok bahasan Kurikulum 1984 yang tidak relevan dengan Kurikulum Jurusan FMP/ IKN yaitu yang berkenaan dengan sila ke-lima Pancasila. Pokok bahasan tersebut adalah: "Teknologi dan Pembangunan" yang meliputi 5 sub pokok bahasan. Atau dengan kata lain hanya 7,14% dari Pokok Bahasan yang berkenaan sila ke-lima itu yang tidak relevan.

Selain dari itu terdapat pula beberapa pokok bahasan kurikulum 1984 yang hanya disinggung oleh materi yang terdapat dalam Silabi Perkuliahan bidang studi Jurusan FMP/ IKN seperti :

1. Pokok bahasan ke-empat sila kedua Pancasila yaitu Azas dan makna keadilan", yang meliputi sub Pokok Bahasan:
 - pengertian keadilan,
 - macam-macam keadilan.

Bila kita teliti analisa relevansi tersebut di atas perlu diakui sebahagian besar pokok bahasan kurikulum 1984 ditunjang /didukung oleh banyak butir materi pokok bahasan dalam silabi perkuliahan Jurusan PMF/ IKN. Pada hakekatnya inilah yang dicita-citakan karena dengan materi yang lebih luas dan mendalam seorang guru dapat mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada anak didik secara mantap.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah ditemukan materi Pokok Bahasan yang sama pada beberapa mata kuliah yang berbeda. Sebagai contoh dapat kita kemukakan :

1. Pokok bahasan yang berkenaan dengan Hak azazi manusia terdapat pada mata kuliah Hak Azazi Manusia dan Hukum Tata Negara.
2. Pokok bahasan yang berkenaan dengan Demokrasi Pancasila terdapat dalam mata kuliah "Demokrasi Pancasila, Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.
3. Pokok bahasan yang berkenaan dengan Fungsi Pajak pada sila ke-lima Pancasila terdapat dalam mata kuliah "Ekonomi Pembangunan Indonesia dan Mata Kuliah Hukum Pajak.

Bila diamati analisa di atas maka kelihatanlah bahwa pokok-pokok bahasan mata kuliah bidang studi Jurusan PMF/ IKN lebih banyak terarah kepada sila keempat, kedua dan kelima. Untuk lebih dapat dipahami dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6

PERBANDINGAN FOKOK BAHASAN YANG TERDAPAT DALAM KURIKULUM 1984 SMA DENGAN KURIKULUM JURUSAN IMI/IKN DALAM MATA KULIAH BIDANG STUDI MENURUT SILA P.SILA

No. :	Sila Pancasila	:Jumlah Fokok Ba: :hasan dalam ku- :rikulum 1984 :SMA.	: Jumlah pokok : bahasan da - : lam silabi m. : k. bidang studi : Jur. IMI /IKN
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	5	12
2.	Kemanusiaan yang adil dan beradab.	8	43
3.	Persatuan Indonesia	9	33
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	12	64
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	14	43

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pada bahagian ini dapatlah dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum relevansi kurikulum Jurusan FMP/ IKN terutama mata kuliah bidang studi cukup relevan dengan kurikulum 1984 SMA bidang studi FMP.
2. Terdapat satu pokok bahasan kurikulum 1984 yang tidak relevan dengan materi dalam silabi perkuliahan Jurusan FMP/ IKN yaitu berkenaan dengan sila ke-lima Pancasila. Dengan demikian hanya 92,86% pokok bahasan sila ke lima itu yang relevan dengan materi perkuliahan Jurusan FMP/ IKN.
3. Terdapat tumpang tindih pokok bahasan dalam silabi perkuliahan dari mata kuliah bidang studi Jurusan FMP/ IKN untuk beberapa mata kuliah. Untuk itu perlu pembicaraan lebih lanjut antara dosen pembina mata kuliah dimaksud.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Oleh karena adanya sebahagian pokok bahasan kurikulum SMA tahun 1984 yang tidak ditemukan dalam materi /silabi perkuliahan bidang studi program S₁, maka disarankan agar Jurusan FMP/ IKN mengadakan revisi silabi perkuliahan.

2. Untuk menghindarkan tumpang tindih pokok bahasan dalam silabi perkuliahan dari mata kuliah bidang studi, disarankan agar dosen-dosen pembina mata kuliah bidang studi tersebut mengadakan pembicaraan "diskusi" sehingga tumpang tindih itu bisa diatasi.
3. Dalam penyusunan silabi perkuliahan dari mata kuliah bidang studi diharapkan pula agar dosen pembina mata kuliah mempedomani kurikulum tahun 1984 bidang studi IMF baik untuk SMTA maupun untuk SMTP.-

DAFTAR BACAAN

1. L.A. Tisna Amijaya, 1980, Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaruan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Di Indonesia, Jakarta, Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pembinaan dan Pengendalian Proyek-proyek. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Deppen, RI. Garis-garis Besar Haluan Negara, Tap MPR RI. No. II/MPR/1983.
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Pedoman Pelaksanaan Sistem Pendidikan II th. 1980.
4. IKIP Padang, Buku Pedoman IKIP Padang tahun 1985/86.
5. Kurikulum SMA tahun 1984 (buku II GBIP bidang studi PMI)
6. Soediyarto, Drs. M.A. 1978, Kurikulum 1975, Jakarta. Direktorat Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Surachmad, Winarno. Prof. Dr. MSCED. Dasar-dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah. Tarsito Bandung, 1975.
8. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
9. S. Nasution, Prof. Dr. M.A., Azas-azas Kurikulum, Bandung C.V. Jemars.
10. Zainal Abidin, Moh. Oemar, 1980. Pengembangan Kurikulum Ilmiah, IKIP Bandung.